

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022**



**KECAMATAN PLOSO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, setiap tahun disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ploso yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 221 menyebutkan Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Berdasarkan hal tersebut kecamatan berada dalam posisi strategis dimana Camat sebagai pimpinan tertinggi harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, juga harus memberikan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Jombang mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Renja merupakan acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun berkenaan;
- Merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Ploso.

Mengingat arti penting dari Renja, maka penyusunannya diupayakan dapat mengakomodasi proses pendekatan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja OPD yang dalam hal ini Rencana Kerja Kecamatan Ploso, penyusunan tersebut harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa dan kecamatan mencakup 5 (lima) pendekatan, yakni pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom up yang selanjutnya menjadi bahan dalam proses Forum OPD.

Penyusunan Renja OPD Kecamatan Ploso Tahun 2022 mengacu pada penyusunan RKPD Tahun 2022 yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023. Pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang :

1. Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional dan digitalisasi proses layanan;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses untuk masyarakat;;
3. Peningkatan daya tarik investasi melalui penyediaan infrastruktur ekonomi dan kemudahan layanan perizinan;
4. Hilirisasi dan peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan;
5. Membangun lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana.

Tema/arah pembangunan daerah tahun 2022 yang harus dapat diwujudkan adalah "**Peningkatan Investasi dan Inovasi Produk Unggulan Daerah melalui hilirisasi ekonomi**" serta sesuai tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ploso Tahun 2022, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 45/D);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
21. Surat Edaran Bupati Jombang Tanggal 7 Januari 2021, Nomor: 050/161/415.42/2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ploso Tahun 2022 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ploso Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ploso Tahun 2022 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan.
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pelaku pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan di era globalisasi dimana informasi terus berkembang, maka tema/arah pembangunan daerah tahun 2020 yang harus dapat diwujudkan adalah “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Sosial dan Infrastruktur Ekonomi untuk mendukung Daya Saing Berbasis Produk Unggulan Daerah”.

Dalam rangka mendukung visi, misi dan tema/arah pembangunan daerah tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ploso pada tahun 2020 melaksanakan 1 urusan yaitu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, yang dijabarkan dalam 4 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 12 Kegiatan.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ploso 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
 - Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan sarana dan prasarana gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
- 3. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD**
 - Penyusunan rencana kerja SKPD
 - Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
 - Penyusunan laporan keuangan SKPD

4. Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ploso

- Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa
- Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sosial Budaya

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan, secara umum capaian kinerja tahun 2020 terjadi peningkatan baik secara kinerja maupun anggaran.

Capaian Kinerja tahun 2020 Kecamatan Ploso :

1. Sasaran Program Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Ploso Minimal Baik dengan target yang ditetapkan 72 realisasi 78,54 (tercapai 109,08%).
2. Sasaran Program Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP dengan target yang ditetapkan nilai B (63,62) realisasi BB (70,36) (tercapai 110,59%).

Anggaran Kecamatan Ploso tahun 2020 adalah Rp. 639.875.597,- terealisasi Rp. 621.502.561,- (tercapai 97,13%).

Berikut disajikan secara terperinci pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2020 serta hambatan dan permasalahan yang terjadi sekaligus kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut, yakni:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Semua Program/Kegiatan Kecamatan Ploso tahun 2020 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan capaian kinerja dan anggaran masing-masing diatas 90% (predikat Sangat Tinggi).

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dapat tercapai 100%. Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 236.464.597 terserap Rp. 223.831.877 (94,66%).

- Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran capaian kerjanya adalah 100% dimana dari indikator kegiatan yaitu jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran ada 29 rekening kegiatan dapat tercapai 29 rekening kegiatan (100%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 236.464.597 terserap Rp. 223.831.877 (94,66%).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur capaian kerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan dapat tercapai 100%. Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 297.814.000 terserap Rp. 294.540.184 (98,90%).

Semua Kegiatan dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur capaian kerjanya adalah 100% dan kinerja anggaran semua kegiatan dapat memenuhi target yang direncanakan.

- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor capaian kerjanya adalah 100%, dimana dari indikator jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor adalah 19 unit dapat tercapai 19 unit (100%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 85.475.000 terserap Rp. 84.883.100 (99,31%).

- Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya capaian kerjanya adalah 100%, dimana dari indikator jumlah gedung kantor/bangunan pendukungnya yang dipelihara adalah 3 unit dapat tercapai 3 unit (100%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 204.744.000 terserap Rp. 202.070.200 (98,69%).

- Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor capaian kerjanya adalah 100%, dimana dari indikator jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara adalah 13 unit dapat tercapai 13 unit (100%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 3.800.000 terserap Rp. 3.795.000 (99,87%).

- Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional capaian kerjanya adalah 100%, dimana dari

indikator jumlah kendaraan dinas/kendaraan operasional yang dipelihara adalah 1 unit R4 dapat tercapai 1 unit R4 (100%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 3.795.000 terserap Rp. 3.791.884 (99,92%).

3. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu dapat tercapai 100%. Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 16.719.000 terserap Rp. 15.813.500 (94,58%).

Semua Kegiatan dari Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD capaian kinerjanya adalah 100% dan kinerja anggaran semua kegiatan dapat memenuhi target yang direncanakan.

- **Penyusunan rencana kerja SKPD**

Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD capaian kinerjanya adalah 100% dimana dari indikator kegiatan yaitu jumlah dokumen Renja Kecamatan Ploso yang tersusun ada 2 dokumen dapat tercapai 2 dokumen (100%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 7.307.000 terserap Rp. 7.151.500 (97,87%).

- **Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD**

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD capaian kinerjanya adalah 100% dimana dari indikator kegiatan yaitu jumlah dokumen LKjIP Kecamatan Ploso yang tersusun 1 dokumen dapat tercapai 1 dokumen (100%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 6.912.000 terserap Rp. 6.162.000 (89,15%).

- **Penyusunan laporan keuangan SKPD**

Kegiatan penyusunan laporan keuangan SKPD capaian kinerjanya adalah 100% dimana dari indikator kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun 2 dokumen dapat tercapai 2 dokumen (100%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 2.500.000 terserap Rp. 2.500.000 (100%).

4. Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ploso

Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ploso capaian kinerjanya adalah 109,08%, dimana dari indikator program yaitu nilai sinergitas kinerja Kecamatan Ploso minimal baik, dimana ditargetkan nilai 72 dapat tercapai nilai 78,54 (109,08%). Dan

dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 88.878.000 terserap Rp. 87.317.000 (98,24%).

Semua Kegiatan dari Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ploso capaian kinerjanya adalah 100% dan kinerja anggaran semua kegiatan dapat memenuhi target yang direncanakan.

- Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemerintahan umum dan desa adalah 22 komponen dapat tercapai 22 komponen (100%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 37.757.000 terserap Rp. 36.957.000 (97,88%).

- Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum adalah 8 komponen dapat tercapai 8 komponen (100%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 5.850.000 terserap Rp. 5.850.000 (100%).

- Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah 11 komponen dapat tercapai 11 komponen (100%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 36.981.000 terserap Rp. 36.220.000 (97,94%).

- Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sosial Budaya

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sosial Budaya capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang sosial budaya adalah 16 komponen dapat tercapai 16 komponen (100%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 8.290.000 terserap Rp. 8.290.000 (100%).

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ploso.

Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ploso capaian kinerjanya adalah 109,08% (melebihi target kinerja yang direncanakan), dimana dari indikator program yaitu nilai sinergitas kinerja Kecamatan Ploso minimal baik, dimana ditargetkan nilai 72 dapat tercapai nilai 78,54 (109,08%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 88.878.000 terserap Rp. 87.317.000 (98,24%).

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan :

- Adanya SOP dan KAK pada masing-masing seksi sebagai dasar dan tolak ukur pelaksanaan kerja.
- Perencanaan yang baik akan kebutuhan penunjang pelayanan.
- Dilaksanakan monitoring pada seluruh kegiatan secara rutin.
- Kompetensi SDM aparatur Kecamatan Ploso yang cukup memadai.
- Kebutuhan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja pelayanan sudah terpenuhi sehingga telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Dukungan dan komitmen Camat Ploso serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Ploso untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan :

- Adanya SOP dan KAK pada masing-masing seksi sebagai dasar dan tolak ukur pelaksanaan kerja.
- Perencanaan yang baik akan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur penunjang pelayanan.
- Dilaksanakan monitoring pada seluruh kegiatan secara rutin.
- Kompetensi SDM aparatur Kecamatan Ploso yang cukup memadai.
- Sarana prasarana aparatur untuk menunjang kinerja pelayanan sudah terpenuhi sehingga telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- Dukungan dan komitmen Camat Ploso serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Ploso untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan :

- Adanya SOP dan KAK pada masing-masing seksi sebagai dasar dan tolak ukur pelaksanaan kerja.
- Perencanaan yang baik akan pemenuhan dokumen perencanaan dan laporan keuangan.
- Dilaksanakan monitoring pada seluruh kegiatan secara rutin.
- Kompetensi SDM aparatur Kecamatan Ploso yang cukup memadai.
- Dukungan dan komitmen Camat Ploso serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Ploso untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ploso

Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan :

- Adanya SOP dan KAK pada masing-masing seksi sebagai dasar dan tolak ukur pelaksanaan kerja.
- Perencanaan yang baik akan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Ploso.
- Dilaksanakan monitoring pada seluruh kegiatan secara rutin.
- Telah terpenuhinya semua komponen sinergitas kinerja bidang pemerintahan umum dan desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang sosial budaya.
- Dukungan dan komitmen Camat Ploso serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Ploso untuk mencapai tujuan organisasi.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ploso. Dari

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Ploso sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah:

- Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ploso tahun 2018-2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Ploso pada umumnya.
- Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ploso berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Kecamatan Ploso.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah:

1. Meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu.
2. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD.
3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi serta memberikan pendampingan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
4. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kepada OPD terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.
5. Perlu adanya penambahan personil di Kecamatan Ploso untuk menunjang kelancaran pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Ploso.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Ploso dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang												
1	01	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian											
1	01	01	Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Ploso Minimal Baik	N/A	68,39	72	78,54	109,08 %	N/A	N/A		
1	01	01	01	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemerintahan umum dan desa	N/A	22 komponen	22 komponen	22 komponen	100%	N/A	N/A	N/A
1	01	01	02	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang ketentraman dan	N/A	8 komponen	8 komponen	8 komponen	100%	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
		ketertiban umum											
1	01	01	03	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	N/A	11 komponen	11 komponen	100%	N/A	N/A	N/A	
1	01	01	04	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial budaya	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang sosial budaya	N/A	16 komponen	16 komponen	100%	N/A	N/A	N/A	
1	01	02		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
1	01	02	01	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	27 Rekening Kegiatan	29 Rekening Kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
1	01	03		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
1	01	03	01	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	N/A	51 unit	19 unit	100%	N/A	N/A	N/A	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 01 03 02	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/ berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	Jumlah gedung kantor/bangunan pendukungnya yang dipelihara	N/A	655 m2	3 unit	3 unit	100%	N/A	N/A	N/A
1 01 03 03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	N/A	63 m2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 01 03 04	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	N/A	-	13 unit	13 unit	100%	N/A	N/A	N/A
1 01 03 05	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	N/A	1 unit R4	1 unit R4	1 unit R4	100%	N/A	N/A	N/A
1 01 03 06	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah pengadaan pakaian olahraga	N/A	22 stel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 01 04	Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
1 01 04 01	Penyusunan rencana strategis SKPD	Jumlah dokumen Renstra Kec. Ploso yang tersusun	N/A	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 01 04 02	Penyusunan rencana	Jumlah dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
	kerja SKPD	Renja Kec. Ploso yang tersusun										
1	01	04	03	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP Kec. Ploso yang tersusun	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
1	01	04	04	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Kec. Ploso yang tersusun	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	85%	100%	
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	3 dokumen	100%	
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah laporan capaian kinerja dan	5 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	5 dokumen	5 dokumen	100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Ploso yang di fasilitasi	14 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	14 bulan	14 bulan	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		pengujian/verifikasi keuangan SKPD								
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	4 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	4 jenis	4 jenis	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	3 jenis	3 jenis	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	12 buku	N/A	N/A	N/A	N/A	12 buku	12 buku	100%
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan	13622 lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	13622 lembar	13622 lembar	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	1 jenis	1 jenis	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Pengadaan sarana Gedung Kantor	29 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	1 unit	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Bangunan Lainnya.									
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Ploso	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	46 stel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa	Jumlah pemenuhan	5 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	5 jenis	5 jenis	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	Pelayanan Umum Kantor	jenis pelayanan umum								
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	85%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	23 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	1 unit	100%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	23 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	23 unit	23 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Ploso yang dipelihara	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana gedung	15 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	15 unit	15 unit	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kantor yang dipelihara								
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	3 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	3 laporan	3 laporan	100%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	3 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	84,5	N/A	N/A	N/A	N/A	83	83	100%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	86%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	85%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	88%	88%	100%
		Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	91%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	90%	100%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1.Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		2.Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	26 lembaga	26 lembaga	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	26 dokumen	26 dokumen	100%
		2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	26 lembaga	26 lembaga	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa	26 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	26 dokumen	26 dokumen	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	/Perubahan APB Desa								
		2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	13 BUMDesa	N/A	N/A	N/A	N/A	13 BUMDesa	13 BUMDesa	100%
		3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	13 TP-PKK	N/A	N/A	N/A	N/A	13 TP-PKK	13 TP-PKK	100%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan	26 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	26 dokumen	26 dokumen	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pengawasan Pelaksanaan APB Desa								
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	26 laporan	26 laporan	100%
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	100%
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas	Jumlah kegiatan identifikasi kasus	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kecamatan Ploso merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh sebab itu maka peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Ploso, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama.

Secara umum, dasar penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Ploso adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau indikator-indikator lainnya yang sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini Kecamatan Ploso menggunakan indikator yang mencerminkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ploso disajikan dengan tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ploso
Kabupaten Jombang

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Keterangan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	-	-	100%	100%	100%	
1.1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	-	-	100%	100%	100%	
1.1.1	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
1.1.2	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	-	-	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	
1.2	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	-	-	100%	100%	100%	
1.2.1	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Ploso yang di fasilitasi	-	-	14 bulan	14 bulan	14 bulan	
1.2.2	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
1.2.3	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-	-	N/A	N/A	N/A	
1.3	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	100%	100%	100%	

1.3.1	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	-	-	4 jenis	4 jenis	4 jenis	
1.3.2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	-	-	3 jenis	3 jenis	3 jenis	
1.3.3	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
1.3.4	Jumlah pemenuhan barang cetak	-	-	12 buku	12 buku	12 buku	
1.3.5	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	-	-	13622 lembar	13622 lembar	13622 lembar	
1.3.6	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	-	-	1 jenis	1 jenis	1 jenis	
1.3.7	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
1.4	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	-	-	100%	100%	100%	
1.4.1	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	N/A	N/A	N/A	
1.4.2	Jumlah Pengadaan sarana Gedung Kantor	-	-	1 unit	11 unit	11 unit	
1.5	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Ploso	-	-	N/A	N/A	N/A	
1.5.1	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	-	-	N/A	N/A	N/A	
1.6	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah	-	-	100%	100%	100%	

	daerah						
1.6.1	Jumlah penyediaan surat menyurat	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
1.6.2	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
1.6.3	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	-	-	5 jenis	5 jenis	5 jenis	
1.7	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	-	85%	85%	85%	
1.7.1	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	
1.7.2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	-	-	23 unit	23 unit	23 unit	
1.7.3	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Ploso yang dipelihara	-	-	N/A	N/A	N/A	
1.7.4	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	-	-	15 unit	15 unit	15 unit	
2	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	-	-	100%	100%	100%	
2.1	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	-	-	3 laporan	3 laporan	3 laporan	
2.1.1	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	-	-	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	

3	Nilai Paten Kecamatan	-	-	83	84	84,50	
3.1	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	-	-	85%	85,5%	86%	
3.1.1	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	-	-	88%	89%	90%	
3.1.2	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	-	-	90%	90,5%	91%	
4	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	-	-	100%	100%	100%	
	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	-	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga	
4.1	1.Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	-	-	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	
	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	-	-	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga	
4.1.1	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	-	-	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	
4.1.2	2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	-	-	13 BUMDesa	13 BUMDesa	13 BUMDesa	
4.1.3	3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	-	-	13 TP-PKK	13 TP-PKK	13 TP-PKK	
5	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	-	-	100%	100%	100%	

	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	
5.1	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	-	-	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	
5.1.1	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	-	-	26 laporan	26 laporan	26 laporan	
6	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	-	-	100%	100%	100%	
6.1	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	-	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
6.1.1	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	-	-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Ploso dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Ploso telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Ploso.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Ploso, adalah:

- a. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Ploso sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kecamatan Ploso.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja.
- c. Belum terakomodirnya seluruh usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Ploso yang disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Jombang.
- d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Ploso sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan melalui berbagai program pembangunan.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat di Kecamatan Ploso untuk tertib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), wilayah Kecamatan Ploso sudah bergerak kearah ekonomi maju dengan mayoritas penduduknya tidak hanya mengandalkan sektor pertanian saja tetapi juga sektor industri dan perdagangan. Akan tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ploso pada tahun 2020 adalah merupakan upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan dimana hal tersebut telah

ditetapkan di dalam Visi Kabupaten Jombang yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023 yakni “Bersama mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing”.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah:
 - a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kab. Jombang Tahun 2018-2023.
 - b. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan.
 - c. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Ploso belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
- b. Jaringan Internet yang masih terkadang *crowded* berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
- e. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Ploso cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 (satu) orang, yang menangani cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode). Sarana prasarana perangkat scanner hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal.

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;
- c. Mengikutsertakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan

penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;

- d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan;
- e. Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai upaya merespon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja serta optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Ploso terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

- a. Perencanaan Pembangunan

- Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2020, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kab. Jombang.
- Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis tahun 2018-2023 sehingga menghasilkan output yang lebih aspiratif.
- Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

- b. Keamanan dan Ketertiban

Setiap tahun OPD Kecamatan Ploso dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Ploso dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

- c. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pada Tahun Anggaran 2020, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Ploso melalui 3 (tiga) program rutin dan 1 program Kecamatan yakni Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan dengan 4 kegiatan.
- d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Diperlukan pembinaan lebih intensif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa agar potensi yang ada dapat lebih berkembang serta dapat bersaing di era globalisasi diantaranya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), perdagangan transnasional, serta perkembangan teknologi informasi.

Sejauh ini tingkat kinerja Kecamatan Ploso sampai dengan akhir Tahun 2020 sebagaimana yang telah ditargetkan dapat direalisasikan dengan baik sesuai perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru, dimana hal ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kebijakan daerah dan kiranya perlu untuk menjadi perhatian pada tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2022 merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang berpedoman pada arah kebijakan tahap ke-4 periodisasi 2018-2023 dari dokumen RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Ploso Tahun 2022.

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Baten Up).

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan melihat kondisi yang berkembang di masyarakat. Untuk lebih meningkatkan kinerja Kecamatan Ploso diperlukan aparatur yang cerdas, terampil, bertanggungjawab, inovatif dan kapabel. Hal tersebut berarti aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean goverment* dan *good governance*.

Kecamatan Ploso mempunyai peran penting dalam proses pembangunan mendukung keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi dan politik di Kecamatan Ploso membutuhkan sinergitas antar seluruh SKPD, disebabkan terbatasnya anggaran dengan kebutuhan pembangunan yang cukup banyak. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kebijaksanaan dalam melihat secara komprehensif demi peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ploso.

Secara keseluruhan hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

KECAMATAN PLOSO

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kec. Ploso	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	85%	3.115.428.648	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kec. Ploso	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.692.967.327	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ploso	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	14.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ploso	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	1.415.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ploso	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ploso	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	815.5000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ploso	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ploso	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	600.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ploso Kec. Ploso	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	2.498.713.648	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ploso Kec. Ploso	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	2.493.061.648	
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%				Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ploso	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Ploso yang di fasilitasi	14 bulan	2.423.263.648	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ploso	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Ploso yang di fasilitasi	14 bulan	2.423.263.648	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Ploso	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Ploso	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	600.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Ploso	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	72.450.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Ploso	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	69.198.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Ploso	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	157.249.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Ploso	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	29.225.800	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ploso	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	4 jenis	4.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ploso	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	4 jenis	2.125.900	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Ploso	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 jenis	26.404.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Ploso	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 jenis	12.061.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Ploso	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	12 bulan	80.905.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Ploso	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	12 bulan	6.700.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Ploso Kec. Ploso	Jumlah pemenuhan barang cetak	12 buku	5.340.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Ploso Kec. Ploso	Jumlah pemenuhan barang cetak	12 buku	3.658.900	
			Jumlah pemenuhan barang penggandaan	13622 lembar				Jumlah pemenuhan barang penggandaan	13622 lembar		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Ploso	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 jenis	2.400.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Ploso	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 jenis	2.220.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kec. Ploso	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 dokumen	38.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kec. Ploso	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 dokumen	2.460.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ploso	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	232.050.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ploso	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	11.967.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ploso	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	145.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ploso	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	-	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec. Ploso	Jumlah Pengadaan sarana Gedung Kantor	1 unit	87.050.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec. Ploso	Jumlah Pengadaan sarana Gedung Kantor	1 unit	11.967.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Kec. Ploso	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Ploso	N/A	14.950.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Kec. Ploso	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Ploso	N/A	-	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Ploso	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	N/A	14.950.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Ploso	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	N/A	-	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Ploso	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	114.560.000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Ploso	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	109.800.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ploso	Jumlah penyediaan surat menyurat	12 bulan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ploso	Jumlah penyediaan surat menyurat	12 bulan	-	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Ploso	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air	12 bulan	41.560.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Ploso	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air	12 bulan	23.350.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
			dan listrik yang terfasilitasi					dan listrik yang terfasilitasi			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ploso	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	5 jenis	73.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ploso	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	5 jenis	86.450.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ploso	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	83.906.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ploso	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	47.497.379	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Ploso	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	62.506.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Ploso	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	43.497.379	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	23 unit				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	23 unit		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Ploso	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Ploso yang dipelihara	N/A	12.500.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Ploso	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Ploso yang dipelihara	N/A	-	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ploso	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	15 unit	8.900.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ploso	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	15 unit	4.000.000	
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec. Ploso	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	-	Program penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum	Kec. Ploso	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Ploso	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	3 laporan	-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Ploso	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	3 laporan	-	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	Kec. Ploso	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	3 kegiatan	-	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Kec. Ploso	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	3 kegiatan	-	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
	Ketahanan Nasional					Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Ploso	Nilai Paten Kecamatan	84	36.500.000	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Ploso	Nilai Paten Kecamatan	84	1.311.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ploso	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	85,5%	36.500.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ploso	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	85,5%	1.311.000	
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Ploso	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	89%	36.500.000	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Ploso	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	89%	1.311.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec. Ploso	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi 1.Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	90,5% 100%	52.700.000	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec. Ploso	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi 1.Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	90,5% 100%	7.497.000	
			2.Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga				26 lembaga			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Ploso	1.Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26 dokumen	52.700.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Ploso	1.Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26 dokumen	7.497.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
			2.Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga				2.Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Ploso	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	26 dokumen	52.700.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Ploso	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	26 dokumen	7.497.000	
2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan			13 BUMDesa	2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan				13 BUMDesa			
3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan			13 TP-PKK	3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan				13 TP-PKK			

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Ploso	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	71.800.000	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Ploso	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	18.202.000	
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%				Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ploso	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	71.800.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ploso	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	18.202.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Ploso	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 laporan	71.800.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Ploso	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 laporan	18.202.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12	
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Ploso	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	10.200.000	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Ploso	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	1.611.000		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Ploso	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	10.200.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Ploso	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	1.611.000		
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Ploso	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	10.200.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Ploso	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	1.611.000		
TOTAL					3.286.628.648	TOTAL					2.721.588.327	

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN PLOSO

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kec. Ploso	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Program Baru
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ploso	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Kegiatan baru
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ploso	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	Sub Kegiatan baru
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ploso	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	Sub Kegiatan baru
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ploso Kec. Ploso	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Kegiatan Baru
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ploso	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Ploso yang di fasilitasi	14 bulan	Sub Kegiatan baru
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Ploso	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	Sub Kegiatan baru
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Ploso	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	Sub Kegiatan baru
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Ploso	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Kegiatan Baru
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kec. Ploso	Jumlah komponen instalasi	4 jenis	Sub Kegiatan baru

	Kantor		listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Ploso	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 jenis	Sub Kegiatan baru
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Ploso	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	12 bulan	Sub Kegiatan baru
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Ploso Kec. Ploso	Jumlah pemenuhan barang cetak	12 buku	Sub Kegiatan baru
			Jumlah pemenuhan barang penggandaan	13622 lembar	Sub Kegiatan baru
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Ploso	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 jenis	Sub Kegiatan baru
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kec. Ploso	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 dokumen	Sub Kegiatan baru
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ploso	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Kegiatan Baru
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ploso	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	Sub Kegiatan baru
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec. Ploso	Jumlah Pengadaan sarana Gedung Kantor	1 unit	Sub Kegiatan baru
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Ploso	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Kegiatan Baru
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ploso	Jumlah penyediaan surat menyurat	12 bulan	Sub Kegiatan baru
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Ploso	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	Sub Kegiatan baru
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ploso	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	5 jenis	Sub Kegiatan baru
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Ploso	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	Kegiatan Baru

	Daerah				
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Ploso	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	Sub Kegiatan baru
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	23 unit	Sub Kegiatan baru
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Ploso	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Ploso yang dipelihara	N/A	Sub Kegiatan baru
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ploso	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	15 unit	Sub Kegiatan baru
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec. Ploso	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	Program Baru
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Ploso	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	3 laporan	Kegiatan baru
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Ploso	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	3 kegiatan	Sub Kegiatan baru
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Ploso	Nilai Paten Kecamatan	84	Program baru
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ploso	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	85,5%	Kegiatan baru
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Ploso	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	89%	Sub Kegiatan Baru
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	90,5%	
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec. Ploso	1.Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	Program baru
			2.Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan	26 lembaga	

			Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Ploso	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26 dokumen	Kegiatan baru	
		2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Ploso	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	26 dokumen	Sub Kegiatan baru	
		2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	13 BUMDesa		
		3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	13 TP-PKK		
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Ploso	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	Program baru	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ploso	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	Kegiatan baru	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Ploso	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 laporan	Sub Kegiatan baru	
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Ploso	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	Program baru	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Ploso	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	Kegiatan baru	

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Ploso	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	Sub Kegiatan baru
--	--	------------	--	-------------	-------------------

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari Rencana RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2022 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun 2022. Sejalan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Kecamatan Ploso Tahun 2022 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2018-2023, **"Peningkatan SDM yang berkualitas, berdaya saing, Religius, dan Berbudaya dengan pemenuhan insfratraktur Dasar"** dan untuk mencapai salah satu misinya, yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing melalui agenda prioritas (Nawa Cita), antara lain: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Visi ini diwujudkan melalui 3 (tiga) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.

Ada 9 (sembilan) Agenda Prioritas (NAWACITA) penting dalam arah kebijakan pembangunan nasional 5 (lima) tahun ke depan sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi di dalam RPJPN tahun 2005-2025, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WNI;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, memasang 5 prioritas nasional dan 24 program pemerintah. Program ini direncanakan hingga tingkat proyek dengan lokasi, sehingga mudah dikendalikan 5 prioritas nasional tersebut antara lain pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar serta pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Selain itu, ada pula penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air, serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Selanjutnya agar penyusunan RKP 2022 hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2022 dapat berjalan efektif, ada tiga langkah sinkronisasi implementasi prinsip *money follows program*. Caranya, dengan mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan, termasuk pendanaan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINAs),

menyusun proyek prioritas nasional hingga satuan tiga, dan menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran. Kedua, memperkuat koordinasi antar K/L, serta antara pusat dan daerah melalui integrasi proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan, kesiapan dan penganggaran proyek prioritas nasional, serta peningkatan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Ketiga, memperkuat kendali program dengan mengalokasikan anggaran dan revisi proyek prioritas nasional, menyempurnakan format RKP, RKA KL, DIPA, dan melaksanakan data sharing antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemenko Bidang Perekonomian untuk pengendalian serta monitoring dan evaluasi.

Dalam RKP 2022, pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2022 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen, dan rasio gini 0,38-0,39. Adapun Indeks Pembangunan Manusia dipatok 71,89 dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2022 dimana merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023. Pada tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan, dari ketujuh arah kebijakan tersebut, terdapat beberapa arah kebijakan yang sudah dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021, dan juga ada penambahan arah kebijakan lainnya, dengan tema/arah pembangunan daerah pada tahun 2022 yaitu **“Peningkatan Investasi dan Inovasi Produk Unggulan Daerah Melalui Hilirisasi Ekonomi”**.

Guna mendukung Arah Pembangunan Daerah tersebut maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja OPD, dimana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, maka tujuan yang ingin dicapai dari Renja tahun 2022 adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja, kualitas layanan publik, dan keberdayaan desa serta menurunkan tingkat pelanggaran perda, perkara, trantibum, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks kualitas layanan publik, jumlah

desa mandiri di Kecamatan, prosentase penurunan pelanggaran perda dan perkara di Kecamatan Ploso.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran OPD Kecamatan Ploso tahun 2022 adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Ploso.

Indikator Sasaran :

1. Nilai SAKIP
2. IKM Kecamatan Ploso
3. IPP Kecamatan Ploso
4. Prosentase Desa dengan kategori minimal Desa Maju di Kecamatan Ploso
5. Prosentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau instansi terkait

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Ploso diarahkan untuk mencapai Visi Bupati Jombang yaitu “Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”.

Untuk Kecamatan difokuskan pada :

Misi ke 1 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional dengan indikator sasaran adalah Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kualitas layanan publik, Jumlah desa mandiri.

Misi ke 2 yaitu “Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya”.

- **Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals)**

SDGs adalah merupakan program pembangunan yang berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Ploso diimplementasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.
- **Pengentasan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ploso. Program dan kegiatan yang dirancang pada RENJA 2022 PD KECAMATAN PLOSO yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses/fasilitas dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- **Pencapaian NSPK dan SPM**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel,

bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Ploso diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

➤ **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Ploso sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan pembuatan lis, pengrajin sepatu, dan sektor pertanian baik padi, jagung, sayur serta tembakau pada musim tertentu. Disamping itu Kecamatan Ploso termasuk kawasan yang akan dikembangkan menjadi daerah industri, sehingga akan memiliki dampak yang besar dalam penyediaan lapangan kerja dan menunjang perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Ploso dan masyarakat Kabupaten Jombang pada umumnya. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih

didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Ploso melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

➤ **Pengembangan Daerah Terisolir**

Daerah terisolir di Kabupaten Jombang juga mulai dikembangkan. Kegiatan pengembangan tersebut diantaranya dilakukan untuk memberi bantuan kepada warga di desa-desa terpencil dan peningkatan infrastruktur jalan jembatan. Di Kecamatan Ploso tidak ada daerah yang terisolir.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

➤ **Jumlah Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Kecamatan Ploso Tahun 2022 mencakup 6 Program, 11 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

➤ **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

➤ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

➤ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan bahan logistik kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd
 - **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
- **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
 - a. Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

➤ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

➤ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Dari 6 Program, 11 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 untuk dilaksanakan di Kecamatan Ploso sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Ploso dan melingkupi semua Desa (13 Desa).

➤ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sumber pendanaan seluruh program dan kegiatan pada Renja 2022 berasal dari APBD Kabupaten Jombang dengan jumlah seluruhnya adalah Rp.2.721.588.327,-

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan ploso Tahun 2022 dan Prakiran Maju Tahun 2023 secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN PLOSO

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Unsur Wilayah								
7.01	Kecamatan								
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Kec. Ploso	100%	2.692.967.327	APBD	Program Baru	100%	3.079.671.148
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Kec. Ploso	100%	1.415.500	APBD	Kegiatan baru	100%	15.400.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Kec. Ploso	3 dokumen	815.5000	APBD	Sub Kegiatan baru	3 dokumen	11.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan	Kec. Ploso	5 dokumen	600.000	APBD	Sub Kegiatan	5 dokumen	4.400.000

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun					baru		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kec. Ploso	100%	2.493.061.648	APBD	Kegiatan Baru	100%	2.501.563.648
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan		100%				100%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Ploso yang di fasilitasi	Kec. Ploso	14 bulan	2.423.263.648	APBD	Sub Kegiatan baru	14 bulan	2.423.263.648
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	Kec. Ploso	1 dokumen	600.000	APBD	Sub Kegiatan baru	1 dokumen	3.300.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Ploso	N/A	69.198.000	APBD	Sub Kegiatan baru	N/A	75.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Ploso	100%	29.225.800	APBD	Kegiatan Baru	100%	165.708.500
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang	Kec. Ploso	4 jenis	2.125.900	APBD	Sub Kegiatan baru	4 jenis	4.620.000

		terfasilitasi							
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	Kec. Ploso	3 jenis	12.061.000	APBD	Sub Kegiatan baru	3 jenis	27.724.200
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	Kec. Ploso	12 bulan	6.700.000	APBD	Sub Kegiatan baru	12 bulan	84.950.300
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	Kec. Ploso	12 buku	3.658.900	APBD	Sub Kegiatan baru Sub Kegiatan baru	12 buku	5.874.000
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan		13622 lembar				13622 lembar	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	Kec. Ploso	1 jenis	2.220.000	APBD	Sub Kegiatan baru	1 jenis	2.640.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Ploso	1 dokumen	2.460.000	APBD	Sub Kegiatan baru	1 dokumen	39.900.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Ploso	100%	11.967.000	APBD	Kegiatan Baru	100%	173.568.000
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ploso	N/A	-	APBD	Sub Kegiatan baru	N/A	88.000.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan	Jumlah Pengadaan	Kec. Ploso	1 unit	11.967.000	APBD	Sub	1 unit	85.568.000

	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	sarana Gedung Kantor					Kegiatan baru		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Ploso	Kec. Ploso	N/A		APBD	Kegiatan Baru	N/A	14.950.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	Kec. Ploso	N/A		APBD	Sub Kegiatan baru	N/A	14.950.000
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Ploso	100%	109.800.000	APBD	Sub Kegiatan baru	100%	120.638.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	Kec. Ploso	12 bulan		APBD	Sub Kegiatan baru	12 bulan	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	Kec. Ploso	12 bulan	23.350.000	APBD	Sub Kegiatan Baru	12 bulan	43.638.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	Kec. Ploso	5 jenis	86.450.000	APBD	Sub Kegiatan baru	5 jenis	77.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kec. Ploso	85%	47.497.379	APBD	Kegiatan baru	85%	87.843.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa	Jumlah Kendaraan	Kec. Ploso	1 unit	43.497.379	APBD	Sub	1 unit	64.748.000

	pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		23 unit			Kegiatan baru	23 unit	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya							
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Ploso yang dipelihara	Kec. Ploso	N/A	-	APBD	Sub Kegiatan Baru	N/A	13.750.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Kec. Ploso	15 unit	4.000.000	APBD	Sub Kegiatan baru	15 unit	9.345.000
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	Kec. Ploso	100%	-	APBD	Program baru	100%	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	Kec. Ploso	3 laporan	-	APBD	Kegiatan baru	3 laporan	-
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	Kec. Ploso	3 kegiatan	-	APBD	Sub Kegiatan baru	3 kegiatan	-

7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	Kec. Ploso	84	1.311.000	APBD	Program Baru	84	38.325.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Kec. Ploso	85,5%	1.311.000	APBD	Kegiatan Baru	85,5%	38.325.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	Kec. Ploso	89%	1.311.000	APBD	Sub Kegiatan baru	89%	38.325.000
		Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	Kec. Ploso	90,5%		APBD		90,5%	
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1.Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	Kec. Ploso	100%	7.497.000	APBD	Program baru	100%	55.335.000
		2.Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kec. Ploso	26 lembaga		APBD		26 lembaga	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	Kec. Ploso	26 dokumen	7.497.000	APBD	Kegiatan baru	26 dokumen	55.335.000

		2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Kec. Ploso	26 lembaga		APBD		26 lembaga	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	Kec. Ploso	26 dokumen	7.497.000	APBD	Sub Kegiatan Baru	26 dokumen	55.335.000
2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan		Kec. Ploso	13 BUMDesa	APBD		13 BUMDesa			
3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan		Kec. Ploso	13 TP-PKK	APBD		13 TP-PKK			
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	Kec. Ploso	100%	18.202.000	APBD	Program baru	100%	75.390.000
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	Kec. Ploso	100%		APBD		100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	Kec. Ploso	26 dokumen	18.202.000	APBD	Kegiatan baru	26 dokumen	75.390.000

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	Kec. Ploso	26 laporan	18.202.000	APBD	Sub Kegiatan baru	26 laporan	75.390.000
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	Kec. Ploso	100%	1.611.000	APBD	Program baru	100%	11.220.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Kec. Ploso	12 laporan	1.611.000	APBD	Kegiatan Baru	12 laporan	11.220.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	Kec. Ploso	12 kegiatan	1.611.000	APBD	Sub Kegiatan baru	12 kegiatan	11.220.000
					2.721.588.327				3.259.941.148

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ploso Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi OPD dan masyarakat yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 harus benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkauan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ploso Tahun 2022 mengacu pada penyusunan RKPD Tahun 2022 yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023. Pada tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan, dari ketujuh arah kebijakan tersebut, terdapat beberapa arah kebijakan yang sudah dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021, dan juga ada penambahan arah kebijakan lainnya, berikut arah kebijakan di tahun 2022:

1. Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional dan digitalisasi proses layanan
2. Optimalisasi pemanfaatan kekuatan agama, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan
3. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integrative, utuh, dan menyeluruh
4. Pemfungsian disabilitas dan prespektif gender dalam pewujudan pelayanan kepada masyarakat
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat
6. Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif
7. Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi layanan perizinan

Tema/arah pembangunan daerah tahun 2022 yang harus dapat diwujudkan adalah “Peningkatan Investasi dan Inovasi Produk Unggulan Daerah Melalui Hilirisasi Ekonomi” serta sesuai tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ploso yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Ploso. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Ploso di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2005-2025.

1.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Ploso berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ploso Tahun 2022 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2022.
- b. Kecamatan Ploso berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Ploso Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Ploso Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2022.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Ploso Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2021.

1.3. Rencana Tindak Lanjut.

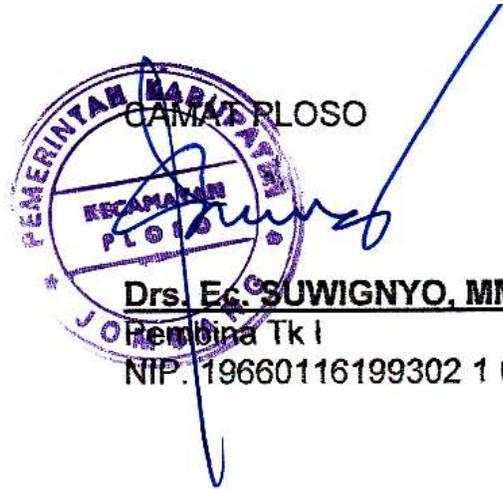
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ploso selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2022, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Ploso Tahun 2022 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Ploso juga memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Ploso ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Bupati Terpilih serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang. Selanjutnya perlu pula ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta Desa dalam wilayah Kecamatan Ploso, sehingga makin memantapkan apa yang telah dicapai sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat.

Demikian Dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Ploso Tahun anggaran 2022 yang dapat kami sampaikan, dengan harapan terwujudlah suatu kegiatan pembangunan yang berkesinambungan.

Ploso, 30 Juni 2021



Drs. E. SUWIGNYO, MM
Rembina Tk I
NIP. 19660116199302 1 001